

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Informasi tentang Profil Badan Publik							
a.	Kedudukan dan alamat lengkap Kantor Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
b.	Visi dan Misi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
c.	Tugas dan fungsi	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
d.	Struktur Organisasi Serta Profil Singkat Pejabat Struktural. Memuat Rincian Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
2	Rencana Strategis Rencana strategis dan renja Dinas Koperasi dan UMKM	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	5 Tahun
3	LHKPN Pejabat yang diverifikasi LHKPN Pejabat Struktural pada Dinas Koperasi UKM	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√			Selama Berlaku
4.	Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan							
a.	Nama Program Prioritas	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun

	Ringkasan Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah							
b.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
c.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
d.	Kalender Pelatihan 2023	Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan	Kepala UPTD Balatkop UMKM	2023	√		√	1 Tahun
5	Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja							
a.	Bidang Kinerja Ringkasan Informasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM -SAKIP -LAKIP	Kepala Subag Perencanaan	Sekretaris	2022	√		√	1 Tahun
b.	Laporan Layanan Informasi Publik Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2022	√		√	1 Tahun
c.	Informasi Peraturan, Keputusan dan atau Ketetapan beserta Rancangannya yang mengikat Publik Berisi Peraturan-peraturan tentang Koperasi dan UMKM	Masing-masing Bidang	Masing-masing Bidang	2023			√	Selama Berlaku
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Ringkasan Paket-paket kegiatan APBD yang akan dilelangkan 2022	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023			√	1 Tahun

7.	Data Keragaan Koperasi di Wilayah Provinsi Kep Bangka Belitung Informasi Keragaan Koperasi lingkup Provinsi Kep Bangka Belitung dengan rincian : - Koperasi aktif & tidak aktif - Jumlah anggota - Penyerapan tenaga kerja - Permodalan - Volume usaha - SHU	Sub Koordinator Kelembagaan	Bidang Koperasi	2022		√	Selama Berlaku
8.	Data Keragaan UMKM di Provinsi Kep Bangka Belitung Informasi Keragaan UMKM Binaan Provinsi Kep Bangka Belitung dengan rincian : - Jumlah UMKM (Produksi/non pertanian, pertanian, perdagangan, jasa) - Penyerapan tenaga kerja - Asset - omzet	Sub Koordinator Data dan Penguatan Kelembagaan	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	2022		√	Selama Berlaku
9.	Pemeringkatan Koperasi Informasi kinerja koperasi, dan menetapkan peringkat kualifikasi koperasi	Sub Koordinator Pengawasan	Bidang Koperasi	2022		√	Selama Berlaku
10.	Data UMKM Sertifikasi Halal	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk	Bidang Pengembangan Usaha Kecil	2022		√	1 Tahun
11.	Data UMKM Terfasilitasi Pameran	Sub Koordinator Promosi	Bidang Pengembangan Usaha	2022		√	1 Tahun

		dan Pemasaran	Kecil					
12.	Data Rekapitulasi KUR Ringkasan Jumlah KUR yang terserap di Babel	Sub Koordinator Pembiayaan	Bidang Pengembangan Usaha Kecil	2022			√	1 Tahun
13	Data Jumlah Peserta Pelatihan Rekapitulasi jumlah peserta pelatihan -Koperasi -UMKM	Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan	Kepala UPTD Balatkop UMKM	2022	√		√	1 Tahun
14.	Ringkasan Laporan Keuangan							
a.	Laporan Realisasi Anggaran 2022 Realisasi Anggaran yang berakhir di Tahun 2022 dengan rincian dana anggaran dan realisasi anggaran	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2022			√	1 Tahun
b.	Daftar Aset dan Inventarisasi Rekap Aset Inventarisasi Tahun 2022 dengan rincian : - tanah - peralatan dan mesin - gedung dan bangunan - jalan, irigasidan jaringan - aset tetap lainnya	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2022			√	1 Tahun

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku

	Berisi informasi Daftar Informasi tahun 2023 yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan informasi serta merta							
2	Kebijakan Badan Publik Informasi Tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2023	√		√	Selama Berlaku
3	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik sesuai ketentuan KIP Berisi tentang : 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik 2. Form permohonan informasi publik 3. Progress permohonan 4. Mekanisme Keberatan Informasi Publik	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2021	√		√	Selama Berlaku
4	S O P Layanan PPID Pembantu Standart Operasional Prosedur tentang pelayanan Informasi Publik yang di sahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM	Kepala Subag Umum	Sekretaris	2021	√		√	Selama Berlaku
5	Tata Cara Pendirian Koperasi Tata Cara Pendirian Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi	Sub Koordinator Kelembagaan	Bidang Koperasi	2021	√		√	Selama Berlaku

3	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
4	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
5	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
6	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
7	Daftar Nilai DP3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
			- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
9	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenalkan pangkat, Kenalkan gaji)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Melindungi data pribadi PNS	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang
10	Data Keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik UKM

11	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
12	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
13	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
14	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya Dok Pertanggungjawab Keuangan Negara yang telah diaudit
15	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j			
16	Hasil pengawasan koperasi	- Permenkop UKM RI No. 17 Tahun 2015	- Dapat menimbulkan keresahan anggota yang pada akhirnya bisa berakibat rush	- Menghindari terjadinya rush	1 Tahun
	a. Pokok-pokok		- Menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi	- Menjaga kepercayaan anggota koperasi	
	b. Temuan Rekomendasi tindak lanjut				
	c. Sanksi yang diterapkan				

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal : 2023

Kepala

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630717 198903 1 009